

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN  
PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (STUDI PADA OPD DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : TEDJO**  
**NPM : 1905170098**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : TEDJO  
N P M : 1905170098  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA OPD DI PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Penguji II

(Pandapotan Rrotonga, S.E., M.Si.)

Pemimbing

(Dr. Eka Nurmalia Sari, SE., Ak., M.Si)

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : TEDJO  
N P M : 1905170098  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada OPD di Provinsi  
Sumatera Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : TEDJO  
N P M : 1905170098  
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, AK, M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA OPD DI PROVINSI SUMATERA UTARA)

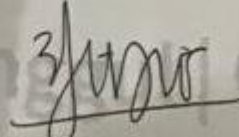
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-		
Bab 2	-		
Bab 3	Uji Validitas & Reliabilitas dibantu di Bab 3.	11/8 23	3/1
Bab 4	Tanggapan responden di publikasi kurang di di anggap pri; pembaharuan pembahas harus lebih diekspansi.	11/8 23	3/1
Bab 5	kesimpulan di publikasi harus harus lebih optimal	11/8 23	3/1
Daftar Pustaka	Referensi dosen lebih diperbaiki	11/8 23	3/1
Persetujuan Sidang Meja Hijau	_____		

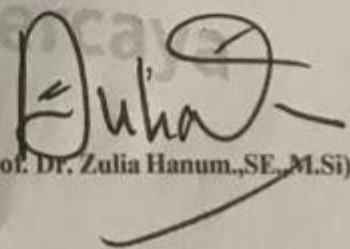
Medan, 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

  
(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, AK, M.Si)

  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TEDJO  
N P M : 1905170098  
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, AK, M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA OPD DI PROVINSI SUMATERA UTARA)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	publik kesmpaha, saran publik las.	12/0 23	3/
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	see skripsi lanjut ke sedang	12/0 23	3/

Medan, 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, AK, M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : TEDJO  
NPM : 1905170098  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada OPD di Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	—		
BAB 2	—		
BAB 3	hasil uji validasi dan Reliabilitas keluar data, waktu penelitian di publikasi	1/7 23	3/1
BAB 4	Penggunaan konsep kecapaian tabel, pembahasan lebih di elaborasi.	1/7 23	3/1
BAB 5	Simpulan publikasi	1/7 23	3/1
Daftar Pustaka	Sitasi dosen plus umk	1/7 23	3/1
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Agustus 2023

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanam, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmana Sari, SE., Ak, M.Si)



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Tedjo  
Npm : 1905170098  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi OPD Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data – data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Tedjo

## ABSTRAK

### **PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA OPD DI PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**TEDJO  
NPM. 1905170098**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email: [tedjo9107@gmail.com](mailto:tedjo9107@gmail.com)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 49 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh berjumlah 49 orang OPD Di Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

***Kata Kunci* : Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah**



## **ABSTRACT**

### ***THE INFLUENCE OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING AND INTERNAL SUPERVISION ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS (STUDY OF OPD IN NORTH SUMATRA PROVINCE)***

**TEDJO**  
**NPM. 1905170098**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email: [tedjo9107@gmail.com](mailto:tedjo9107@gmail.com)

*The purpose of this study was to examine and analyze the effect of the application of public sector accounting and internal control on the performance of government agencies (study on OPD in North Sumatra province). The approach used in this study is an associative approach. The population in this study were all OPD in North Sumatra Province totaling 49 people. The sample in this study used a saturated sampling of 49 OPD people in North Sumatra Province. Data collection techniques in this study used observation techniques and questionnaires. Data analysis techniques in this study used a quantitative approach using statistical analysis using the Outer Model Analysis test, Inner Model Analysis, and Hypothesis Testing. Data processing in this study uses the PLS (Partial Least Square) software program. The results of this study prove that the Application of Public Sector Accounting has an effect on the Performance of Government Agencies. The Application of Public Sector Accounting and Internal Control Affects the Performance of Government Agencies*

***Keywords: Application of Public Sector Accounting, Internal Control and Performance of Government Agencies***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara)**”

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pendidikan Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda tercinta **Drs. TURUT** dan Ibunda **ROSLIANI** tercinta yang selalu memberikan do’a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih Pendidikan yang layak hingga bangku perkuliahan

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr Januri, SE,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, M.Si** selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Kepada para sahabat-sahabat penulis yaitu Rizky, Andre Firjatullah, Luthfi D Muzaffar, Muhammad Ridho Zaky, Fikri Adrian dan Faisal Hadianto Lubis terima kasih atas segala motivasi, perhatian dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Amin Ya Rabbal'alam*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Agustus 2023  
Penulis

**TEDJO**  
**NPM 1905170098**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Rumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Uraian Teoritis .....	12
2.1.1. Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
2.1.1.1. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
2.1.1.2. Tujuan dan Manfaat Kinerja Instansi Pemerintah .....	13
2.1.1.3. Faktor-Faktor Kinerja Instansi Pemerintah .....	14
2.1.1.4. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah .....	15
2.1.2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik .....	17
2.1.2.1. Pengertian Penerapan Akuntansi Sektor Publik .....	17
2.1.2.2. Jenis Jenis Penerapan Akuntansi Sektor Publik .....	18
2.1.2.3. Indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik .....	19
2.1.3. Pengawasan Internal.....	22
2.1.3.1. Pengertian Pengawasan Internal .....	22
2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan Internal.....	24
2.1.3.3. Indikator Pengawasan Internal .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Konseptual.....	28
2.3.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah .....	28
2.3.2 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja	

Instansi Pemerintah .....	29
2.4 Hipotesis .....	30
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Definisi Oprasional.....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian .....	47
4.1.2 Identitas Responden.....	47
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
4.1.4 Analisis Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	59
4.1.5 Analisis Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	64
4.1.6 Koefisien Determinasi ( <i>R Square</i> ) .....	66
4.2. Pembahasan .....	68
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Rendah .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Indikator Variabel.....	32
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	34
Tabel 3.3 Populasi .....	35
Tabel 3.4 Skala Pengukuran .....	37
Tabel 3.5 Uji Validitas .....	38
Tabel 3.6 Uji Realibilitas.....	39
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	47
Tabel 4.2 Tingkatan Pendidikan responden .....	48
Tabel 4.3 Umur Responden.....	48
Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden.....	49
Tabel 4.5 Pedoman Kategorisasi Rata Rata.....	50
Tabel 4.6 Skor Angket Kinerja Instansi Pemerintah .....	51
Tabel 4.7 Skor Angket Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik.....	53
Tabel 4.8 Skor Angket Pengawasan Internal.....	56
Tabel 4.9. Analisis Konsistensi Internal .....	59
Tabel 4.10. Validitas Konvergen.....	60
Tabel 4.11. Validitas Diskriminan.....	61
Tabel 4.12.Kolineiritas .....	62
Tabel 4.13. Hipotesis Pengaruh langsung .....	65
Tabel 4.14. Koefisien Determinasi .....	66
Tabel 4.14. F Square.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 3.1 Model Struktural PLS .....	42
Gambar 3.2 Model Analisis Persamaan Struktural.....	44
Gambar 4.1 Persentasi Jawaban Kinerja Instansi Pemerintah .....	52
Gambar 4.2 Persentasi Jawaban Penerapan Akuntansi Sektor Publik .....	56
Gambar 4.3 Persentasi Jawaban Pengawasan Internal .....	57
Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis .....	64



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan terdiri dari Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Susunan pada pemerintahan mengalami pergantian dari sistem lama dengan tujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik untuk memiliki kekuatan dalam membuat keputusan kebijakannya

Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan makna demokrasi yang menyatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Indonesia sedang dalam proses mewujudkan pembangunan daerahnya melalui kinerja terbaiknya (Lubis et al., 2023)

Penilaian kinerja pada setiap organisasi sangat penting dilakukan khususnya di pemerintahan baik sebagai penilaian individu maupun penilaian keseluruhan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan juga sebagai alat ukur penilaian kinerja periode yang lalu untuk di gunakan

sebagai dasar penyusunan strategi periode selanjutnya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik (Amran, 2019).

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media untuk melaporkan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas tuntutan pertanggung jawaban dalam laporan keuangan. Dengan itu akuntabilitas kinerja dapat tercapai apabila memenuhi suatu prinsip dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan akan menunjukkan kualitas informasi yang baik jika dalam laporan keuangan dipengaruhi dengan penerapan standar akuntansi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, departemen dan lembaga negara yang menjadikan akuntansi sektor publik sebagai patokan dalam menyelesaikan permasalahan publik (Rahmawati, 2022).

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil

kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya (Fitriyani & Herawati, 2019).

Adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang juga merupakan sebuah kebijakan yang ada di Indonesia yang menyebabkan terbentuknya *Good Governance* sebagai syarat untuk mewujudkan segala aspirasi masyarakat untuk memperoleh tujuan serta cita – cita bangsa dan Negara. Jika *Good Governance* diterapkan dengan baik maka kinerja dalam suatu organisasi pun akan baik sesuai dengan tujuan. Tentunya dari tujuan diatas maka sebuah usahapun harus dilakukan guna menciptakan pemerintah yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip – prinsip dari *Good Governance* yang bertujuan untuk menata pemerintah lebih baik begitupun dengan Negara, Salah satu faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas kinerja adalah akuntansi sektor publik (Rahmawati, 2022).

Akuntansi Sektor Publik sendiri merupakan sebuah entitas yang berbeda dan unik karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba) (Heluka et al., 2022).

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014). Akuntansi sektor publik memiliki

kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks di bandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Akuntansi sektor publik saat ini khususnya di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Akuntansi sektor publik dapat menuntut sektor publik untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan publik. Sektor publik merupakan penyedia layanan terhadap kepentingan masyarakat yang paling utama di Indonesia dan juga merupakan sarana bagi undang-undang untuk melaksanakan kebijakan sosial. (Heluka et al., 2022)

Menurut (Haryanto et al., 2013) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup

perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah pengawasan internal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif (Widyatama et al., 2017)

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk kepentingan gubernur/bupati/walikota dalam

melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya (Manik & Sari, 2022)

Menurut (Sabeni & Ghozali, 2014) pengawasan intern merupakan suatu alat dari pemimpin organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2016).

Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.

Tabel 1.1

Indikator Kinerja Pemprov Sumut Yang Rendah

No	Indikator Kinerja	Interprestasi
1	Pertumbuhan Ekonomi	Rendah
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Kurang

Berdasarkan observasi maka dapat ditemukan fenomena yang terjadi yakni mengenai kinerja instansi pemerintah, bahwa dari anggaran yang telah ditetapkan selama dua tahun terakhir dari tahun 2021 dan tahun 2022 hampir 90 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut tidak mampu menggunakan sepenuhnya anggaran yang telah disediakan hingga 100 persen, selalu ada sisa dari anggaran tiap tahunnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

(performance improvement). Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Provinsi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset nampak sangat rumit dan complicated, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan, padahal sebenarnya penyelesaiannya bisa ”sangat sederhana. Yang menjadi permasalahan adalah OPD di Provinsi Sumatera Utara tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja yang diakibatkan oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan.

Dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan OPD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 bahwa opini yang diberikan berupa Wajar Tanpa



Pengecualian (WTP) dari hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kualitas laporan keuangan OPD di Provinsi Sumatera Utara sangat baik, akan tetapi pelaksanaannya tidak semua OPD di Provinsi Sumatera Utara mampu menggunakan anggaran yang diberikan secara penuh, sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berupa prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lemah Pada OPD di Provinsi Sumatera Utara yang tidak mampu menggunakan anggaran secara keseluruhan.
2. Tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja oleh OPD di Provinsi Sumatera Utara yang diakibatkan oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan.

3. Provinsi Sumatera Utara yang meraih Opini WTP dari BPK akan tetapi anggaran yang disediakan di tiap OPD di Provinsi Sumatera Utara tidak terealisasi 100 %.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara)?
2. Apakah ada pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara)?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
  - b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Instansi Pemerintah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Saragih, 2017).

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan, tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik yaitu: mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, memperbaiki kinerja periode berikutnya dan menciptakan akuntabilitas publik. Informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan good governance (Alfitriady et al., 2020)

Menurut (Mulyadi, 2011) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan (Sutrisno, 2014) kinerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Menurut (Mattoasi et al., 2021) Kinerja pemerintah daerah yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing- masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut (Mardiasmo, 2016) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang Memberikan telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

#### **2.1.1.3 Faktor Faktor Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut (Alfitriady et al., 2020) adapun faktor faktor kinerja instansi pemerintah adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar yang paling utama dalam setiap organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia organisasi tidak akan bisa bergerak. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka mencapai strategi dan tujuan yang terus ditetapkan oleh organisasi tanpa individu yang memiliki keahlian, organisasi tidak dapat mencapai tujuan.

2. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

Penerapan sistem pengendalian intern sangat penting untuk menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Tujuan dari penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

### 3. Gaya kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

#### **2.1.1.3 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut (Mardiasmo, 2016) indikator kinerja pemerintah yakni *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Ekonomi

Yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang

digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif.

## 2. Efisiensi

Yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

## 3. Efektivitas

Yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Menurut (Haryanto et al., 2013) menyatakan bahwa salah satu tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan konsep *value for money* dalam aktivitas organisasi sektor publik.

### 1. *Value for money*

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup.

### 2. Keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality).

Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.



### 3. Distribusi secara merata (equality).

Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata

## **2.2.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

### **2.2.1.1 Pengertian Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi sektor publik saat ini khususnya di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Akuntansi sektor publik dapat menuntut sektor publik untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan publik. Sektor publik merupakan penyedia layanan terhadap kepentingan masyarakat yang paling utama di Indonesia dan juga merupakan sarana bagi undang-undang untuk melaksanakan kebijakan sosial.

Menurut (Bastian, 2014) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan.

### **2.2.1.2 Jenis Jenis Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

##### a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya:

- 1) Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan lain lain.
- 2) Lembaga dan badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

##### b. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. Contohnya:
  - a. Perguruan tinggi
  - b. Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah
  - c. Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya:
  - a. Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain;
  - b. Sekolah dan universitas swasta
  - c. Rumah sakit milik swasta.

### **2.2.1.3 Indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut (Bastian, 2014) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain :

#### **1. Perencanaan Publik**

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

## 2. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

## 3. Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis

dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.

#### 4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

#### 5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

#### 6. Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima

umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

## 7. Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

### **2.1.3. Pengawasan Internal**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pengawasan Internal**

Pengawasan adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah, mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan system internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi, pegawai, dan masyarakat (Hasibuan, 2009: 197) Pengawasan adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah, mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan system internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi, pegawai, dan masyarakat (Hasibuan, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa: pengawasan internal adalah

seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Menurut (Kadarisman, 2013) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut (Halim & Kusufi, 2012) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal. Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas- tugas organisasi.

Menurut (Handoko, 2015) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari

program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan Internal**

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “pengawasan dari dalam (Internal Control) dan pengawasan dari luar (Eksternal Control)”. Pengawasan dari dalam (Internal Control) berarti “pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit Pengawasan yang terbentuk didalam organisasi itu sendiri. Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan organisasi.

Menurut (Mulyadi, 2011) menyatakan bahwa tujuan Pengawasan internal meliputi

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektifitas dan efisiensi operasi
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

### **2.1.3.3. Indikator Pengawasan Internal**

Menurut (Swastha & Handoko, 2002) mengenai hal tersebut :



1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang diterapkan sejak suatu pekerjaan belum dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Pengawasan korektif adalah pengawasan yang dilaksanakan untuk perbaikan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan (korektif) terdiri dari langkah-langkah kerja berikut ini :
  - a. Menciptakan standar
  - b. Membandingkan kegiatan yang diperlukan dengan standar yang ada.
  - c. Melakukan tindakan koreksi

Selanjutnya menurut (Hasibuan, 2019) indikator pengawasan terdiri dari :

1. Preventive Control, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive control ini dilakukan dengan cara:
  - a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan
  - b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan
  - c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu
  - d. Mengorganisasi segala macam kegiatan
  - e. Menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap individu.
  - f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan
  - g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

2. Representative Control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Representative Control dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil dengan rencana
- b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya
- c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikarenakan sanksi hukuman kepadanya.
- d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada
- e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana
- f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui training dan education.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Tadjudinsyah & Fitria, 2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan positif, Artinya Bahwa Apabila Semakin Baik Akuntansi Sektor Publik Maka Cenderung Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah,
2	(Jatmiko, 2020)	Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi	Pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah; Akuntabilitas

		Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah; dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
3	(Amran, 2019)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo	Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.
4	(Heluka et al., 2022)	Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo
5	(Irawati & Agesta, 2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja	Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut : kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) kota Bandar Lampung. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah kota

			Bandar Lampung
6	(Peilouw et al., 2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kupang)	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.2. Kerangka Konseptual

### 2.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan anggaran merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan. Penyusunan anggaran publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Manik & Sari, 2022)

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan

pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto et al., 2013).

Akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini sedang berjalan. Kaitannya dengan reformasi sektor publik, otonomi daerah menjadi salah satu bagian dari reformasi sektor publik itu sendiri. (Sari, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Peilouw et al., 2023), (Septiani et al., 2022), (Gea, 2021), (Rahmawati, 2022), (Tadjudinsyah & Fitria, 2023) dan (Purba & Amrul, 2018) menunjukkan bahwa penerapan standart akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.2.2 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

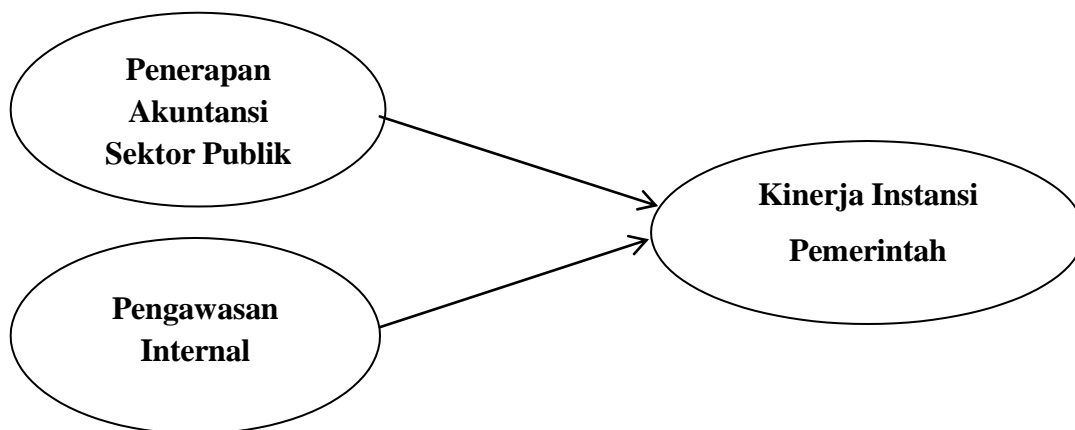
Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Sanjaya et al., 2021)

Kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan seseorang. Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Alpi, 2019)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok et al., 2021), (Jatmiko, 2020), (Tadjudinsyah & Fitria, 2023) dan (Rahayu & Yudi, 2021), menyebutkan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji.

Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendrayani, 2015)

1. Ada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara).
2. Ada pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Di Provinsi Sumatera Utara).

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah:

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel dependen yakni Kinerja Instansi Pemerintah sebagai (Y) dan variabel independen, yaitu Penerapana Standar Akuntansi Sektor Publik sebagai (X<sub>1</sub>) dan Pengawasan Internal sebagai (X<sub>2</sub>).

**Tabel 3.1.**

#### **Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
<b>Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</b>	Kinerja pemerintah daerah yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan	1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas	<b>Ordinal</b>



	pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya (Mattoasi et al., 2021)		
<b><i>Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X<sub>1</sub>)</i></b>	Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Publik</li> <li>2. Penganggaran Publik</li> <li>3. Realisasi Anggaran Publik</li> <li>4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik</li> <li>5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik</li> <li>6. Audit Sektor Publik</li> </ol>	<b>Ordinal</b>
<b><i>Pengawasan Internal (X<sub>2</sub>)</i></b>	Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai (Handoko, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan preventif</li> <li>2. Pengawasan korektif</li> </ol>	<b>Ordinal</b>

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2023																													
		Februai				Maret				April				Mei				Juni				Juli									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1.	Penelitian Pendahuluan																														
2.	Pengajuan Judul																														
3.	Penyusunan Proposal																														
4.	Seminar Proposal																														
5	Riset																														
6	Pengolahan Data																														
7	Sidang Skripsi																														

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### 3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendrayani, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi Sumatera Utara.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (total sampling). Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi kurang dari 100 (Suryani & Hendrayani, 2015)

Mengingat jumlah populasi hanya sebesar 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi Sumatera Utara, maka layak untuk diambil keseluruhan untuk dijadikan sampel tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu.

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 49 Orang dimana tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi Sumatera Utara hanya satu orang.

**Tabel 3.3**  
**Sampel Penelitian**

No	OPD
----	-----

1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Badan Penghubung Daerah Provinsi
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Biro Administrasi Pembangunan
11	Biro Administrasi Pimpinan
12	Biro Hukum
13	Biro Kesejahteraan Rakyat
14	Biro Organisasi
15	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
16	Biro Pengadaan Barang/Jasa
17	Biro Perekonomian
18	Biro Umum
19	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

22	Dinas Kehutanan
23	Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Dinas Kesehatan
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
27	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
29	Dinas Lingkungan Hidup
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Dinas Pemuda dan Olahraga
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
34	Dinas Pendidikan
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Dinas Perhubungan
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
38	Dinas Perkebunan
39	Dinas Perpustakaan dan Arsip
40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	Dinas Sosial

42	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
43	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
44	Dinas Tenaga Kerja
45	Inspektorat Daerah Provinsi
46	Rumah Sakit Haji
47	Rumah Sakit Jiwa
48	Satuan Polisi Pamong Praja
49	Sekretariat DPRD

**Sumber : Pemprovsu**

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Daftar Pertanyaan (*Questioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi Sumatera Utara.

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/ Pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Skala Pengukuran**

<b>PERNYATAAN</b>	<b>BOBOT</b>
Sangat Memadai	5
Memadai	4

Kurang Memadai	3
Tidak Memadai	2
Sangat Tidak Memadai	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

#### a. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018). Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : (Sugiyono, 2019)

Dimana :

$n$  = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$  = Jumlah pengamatan variabel  $x$

$\sum y$  = Jumlah pengamatan variabel  $y$

$(\sum x^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variable  $x$

$(\sum y^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variable  $y$

$\sum xy$  = Jumlah hasil kali variable  $x$  dan  $y$

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018).

**Tabel 3.5 Uji Validitas**

Item Pernyataan		r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y1	0.904	0.2876	Valid
	Y2	0.929	0.2876	Valid
	Y3	0.910	0.2876	Valid
	Y4	0.781	0.2876	Valid
	Y5	0.847	0.2876	Valid
	Y6	0.804	0.2876	Valid
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	X1.1	0.874	0.2876	Valid
	X1.2	0.861	0.2876	Valid
	X1.3	0.830	0.2876	Valid
	X1.4	0.901	0.2876	Valid
	X1.5	0.841	0.2876	Valid
	X1.6	0.885	0.2876	Valid
Pengawasan Internal	X2.1	0.766	0.2876	Valid
	X2.2	0.898	0.2876	Valid
	X2.3	0.806	0.2876	Valid
	X2.4	0.879	0.2876	Valid
	X2.5	0.833	0.2876	Valid
	X2.6	0.744	0.2876	Valid

1. Nilai validitas untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.2876 maka semua indikator pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan valid.
2. Nilai validitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik lebih besar dari nilai r tabel 0.2876 maka semua indikator pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik dinyatakan valid.



3. Nilai validitas Pengawasan Internal lebih besar dari nilai r tabel 0.2876 maka semua indikator pada variabel Pengawasan Internal dinyatakan valid

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha*  $> 0,6$ , maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha*  $< 0,6$ , maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

**Tabel 3.6**

#### **Hasil Uji Realibilitas**

No	Variabel	Nilai Alpha	Status
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,930	Realibilitas Baik
2	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0,932	Realibilitas Baik
3	Pengawasan Internal	0,901	Realibilitas Baik

1. Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai reliabilitas sebesar  $0,724 > 0,600$  maka variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah reliabel
2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai reliabilitas sebesar  $0,661 > 0,600$  maka variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah reliabel
3. Pengawasan Internal memiliki nilai reliabilitas sebesar  $0,698 > 0,600$  maka variabel Pengawasan Internal adalah reliabel

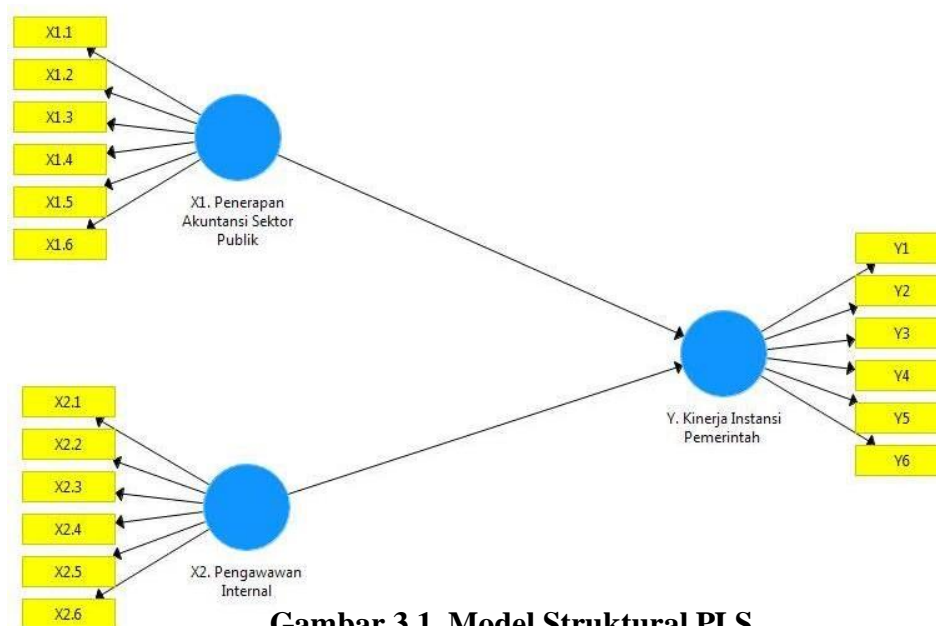
### 3.6 Teknik Analisis Data

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latan 2015). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi)

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan

pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.



**Gambar 3.1. Model Struktural PLS**

Menurut (Hair Jr et al., 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu

1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*), yakni
  - a. validitas konvergen (*Convergent Validity*);
  - b. realibilitas dan validitas konstruk (*Construct Reliability And Validity*);
  - c. validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)
2. Analisis model struktural (*Inner Model*), yakni
  - a. Koefisien determinasi (*R-Square*);
  - b. f-square; dan
  - c. pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan

estimasi jalur (*Path Estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*Loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

### **3.6.1 Analisa Outer Model**

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

#### *1. Convergent Validity*

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi  $> 0,7$  dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

#### *2. Discriminant Validity*

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot Of Average Variance Extracted* (AVE).

### 3. *Composite reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *View Latent Variable Coefficient*. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's Alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

### 4. *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha  $> 0,7$ .

## 3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*Inner Relation, Structural Model Dan Substantive Theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari

koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

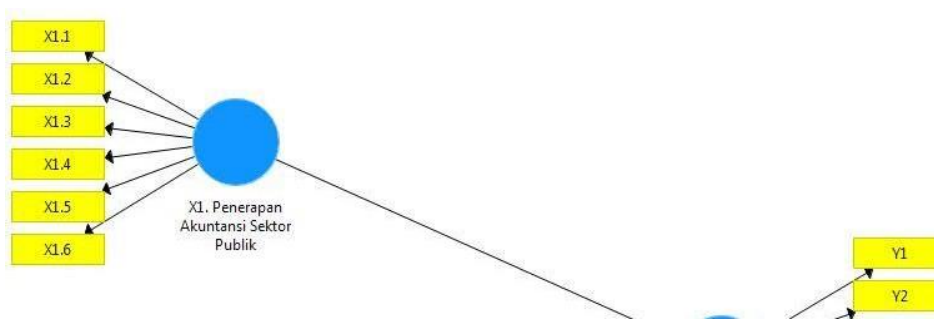
Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak ketika t-statistik  $> 1,96$ . Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai probabilitas  $< 0,05$ .

### 3.6.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.



### **Gambar 3.2. Model Analisis Persamaan Struktural**

#### **3.6.5 Uji Kecocokan (Testing Fit)**

Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai R-square, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali & Latan, 2015).

##### **1. R-Square Test**

Nilai R-square atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman konstruk-konstruk eksogen yang mampu menjelaskan konstruk endogen secara serentak. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini juga digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 1. Semakin

tinggi nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square ( $r^2$ ) digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel laten dependen secara substantive (Ghozali & Latan, 2015)

## **2. Path Coefficient Test.**

Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01 . Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Variabel Data

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y), 6 pernyataan untuk Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X1), dan 6 pernyataan untuk Pengawasan Internal (X2). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 49 orang responden pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

##### 4.1.2 Identitas Responden

###### 4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1.**  
**Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	40	81,63 %
2	Perempuan	9	18,37 %
TOTAL		49	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 40 (81,63%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 9 (18,37%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki laki pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Umur

**Tabel 4.2**  
**Umur Responden**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 Tahun	30	61,22 %
2	31 – 40 Tahun	11	22,44 %
3	41 - 50 Tahun	8	16,32 %
4	51 - 60 Tahun	0	0 %
TOTAL		49	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 30 orang (61,22 %), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 11 orang (22,44 %), dan berumur 41- 50 tahun yaitu sebanyak 8 orang (16,32 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu 21 sampai 30 tahun pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Tingkatan Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D3	4	8,16 %
2	S1	38	77,55 %
3	S2	17	34,69 %
4	S3	0	0 %
TOTAL		49	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang berlatar belakang pendidikan D3 sebanyak 4 orang (8,16 %), pendidikan S1 sebanyak 38 orang (77,55%), dan pendidikan Strata-2 yaitu sebanyak 17 orang (34,69 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berlatar belakang pendidikan Strata-1 pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

**Tabel 4.4**  
**Lama Bekerja Responden**

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	< 10 Tahun	42	85,71 %
2	11 - 20 Tahun	7	14,29 %
3	> 20 Tahun	0	0 %
TOTAL		49	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang lama bekerja < 10 tahun sebanyak 42 orang (85,71 %), dan lama bekerja 11 - 20 tahun sebanyak 7 orang (14,29 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu kurang dari 10 tahun pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu Kinerja Instansi Pemerintah (Y), Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X1) dan Pengawasan Internal (X2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi

jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2019) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategorinya yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

**Pedoman Kategorisasi Rata Rata Skor Tanggapan Responden**

<b>Interval Kuisioner</b>	<b>Kategori</b>
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 – 2,60	Tidak Baik
2,61 – 3,40	Kurang Baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat Baik

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas anggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### 4.1.3.1 Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Alternatif Jawaban Dan Skor										
No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Jumlah	Rata Rata	Kategori
	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan	F	24	12	8	2	3	49	4,63	Sangat Baik
		%	48.98	24.49	16.33	4.08	6.12	100		
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan	F	18	17	9	2	3	49	4,47	Sangat Baik
		%	36.73	34.69	18.37	4.08	6.12	100		
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan	F	18	17	10	1	3	49	4,49	Sangat Baik
		%	36.73	34.69	20.41	2.04	6.12	100		
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan	F	15	12	16	3	3	49	4,19	Sangat Baik
		%	30.61	24.49	32.65	6.12	6.12	100		
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai	F	16	17	10	3	3	49	4,35	Sangat Baik
		%	32.65	34.69	20.41	6.12	6.12	100		

	dengan waktu yang ditentukan									
6	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan	F	17	14	4	11	3	49	4,30	Sangat Baik
		%	34.69	28.57	8,16	22.45	6.12	100		
<b>Total Nilai Rata Rata</b>			18	14,8	10,7	2,5	3		4,40	

Sumber : Data Primer (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban tinggi dengan skor tertinggi pada item pernyataan “Pada Instansi Tempat Saya Bekerja, Telah Menetapkan Indikator Kinerja Untuk Setiap Kegiatan Atau Program Yang Akan Dilaksanakan” sebanyak 24 (48,98 %). Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera sudah menerapkan indikator kinerja dengan baik. Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata tertinggi 4,40. Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.1 Persentasi Jawaban Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan gambar diagram diatas, persentase jawaban responden untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah tinggi yaitu sebesar 37 %, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mengetahui hasil kinerja sangat memadai bagi suatu Organisasi Perangkat Daerah

#### 4.1.3.2 Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X1)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

**Skor Angket Untuk Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik**

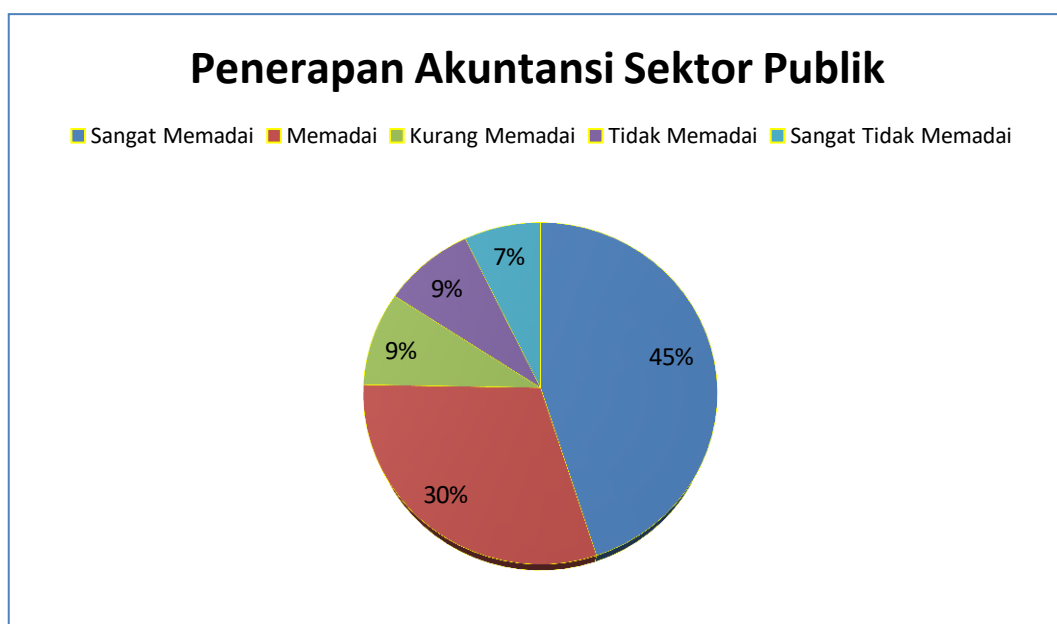
Alternatif Jawaban Dan Skor										
No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Jumlah	Rata Rata	Kategori
1	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu	F	23	14	7	2	3	49	4,14	Sangat Baik
		%	46.94	28.57	14.29	4.08	6.12	100		
2	Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya	F	21	17	4	4	3	49	4,74	Sangat Baik
		%	42.86	34.69	8.16	8.16	6.12	100		

	kesinambungan entitas									
3	Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan	F	16	15	8	7	3	49	4,53	Sangat Baik
		%	32.65	30.61	16.33	14.29	6.12	100		
4	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan - catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan	F	18	20	3	4	4	49	4,60	Sangat Baik
		%	36.73	40.82	6.12	8.16	8.16	100		
5	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan	F	28	10	2	5	4	49	4,65	Sangat Baik
		%	57.14	20.41	4.08	10.2	8.16	100		
6	Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat	F	28	12	2	3	4	49	4,33	Sangat Baik
		%	57.14	24.49	4.08	6.12	8.16	100		



menunjukkan informasi tentang Kinerja Instansi Pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik									
<b>Total Nilai Rata Rata</b>		22,3	14,7	4,33	4,2	3,5		4,54	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban tinggi dengan skor tertinggi pada item pernyataan “Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dan Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang Kinerja Instansi Pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik” sebanyak 28 (57,14 %). Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera sudah menerapkan indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan baik. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata tertinggi 4,54. Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Berdasarkan gambar diagram diatas, persentase jawaban responden untuk variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik tinggi yaitu sebesar 45 %, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat melakukan penerapan Akuntansi Sektor Publik sangat memadai bagi suatu Organisasi Perangkat Daerah

#### 4.1.3.4 Variabel Pengawasan Internal (X2)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pengawasan Internal sebagai berikut :

**Tabel 4.8**

**Skor Angket Untuk Variabel Pengawasan Internal (X2)**

Alternatif Jawaban Dan Skor										
No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Jumlah	Rata Rata	Kategori
1	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas	F	8	29	4	2	6	49	4,63	Sangat Baik
		%	16.33	59.18	8.163	0.04	0.12	100		

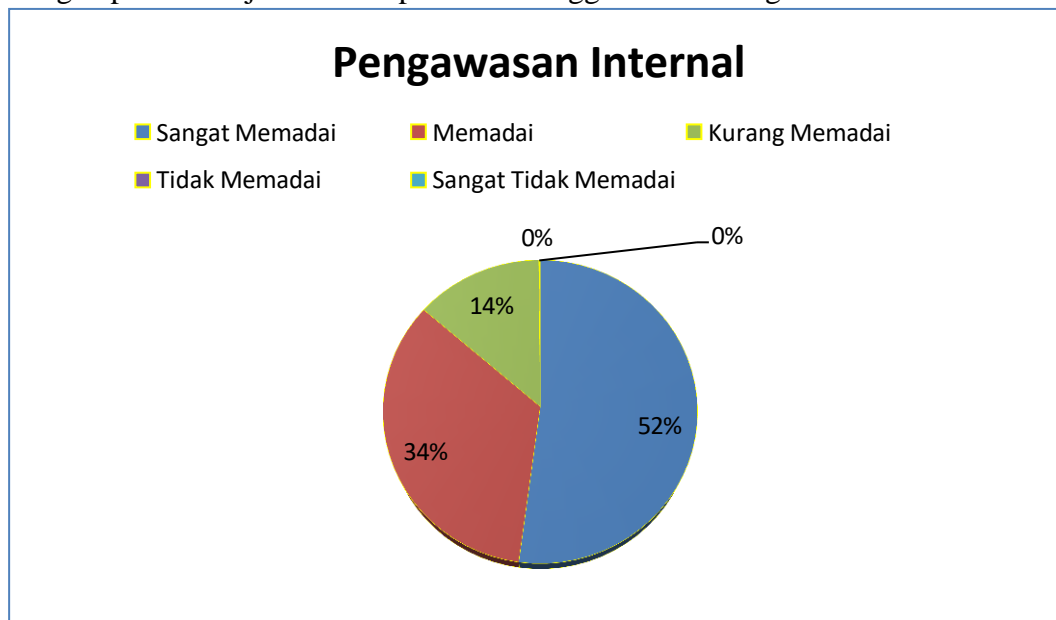
	entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu									
2	Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas	F	25	15	4	2	3	49	4,56	Sangat Baik
		%	51.02	30.61	8.163	0.04	0.06	100		
3	Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan	F	26	9	6	3	5	49	4,21	Sangat Baik
		%	53.06	18.37	12.24	0.06	0.1	100		
4	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan - catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari	F	24	13	6	2	4	49	4,44	Sangat Baik
		%	48.98	26.53	12.24	0.04	0.08	100		

	pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan									
5	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan	F	29	6	7	3	4	49	4,65	Sangat Baik
		%	59.18	12.24	14.29	0.06	0.08	100		
6	Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang Kinerja Instansi Pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik	F	19	14	7	5	4	49	4,74	Sangat Baik
		%	38.78	28.57	14.29	0.1	0.08	100		
<b>Total Nilai Rata Rata</b>			21,8	14,33	5,67	2,83	4,33		4,50	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pengawasan Internal, bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban tinggi dengan skor tertinggi pada item pernyataan “Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan” sebanyak 29 (59,18 %). Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera sudah menerapkan

indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan baik. Pengawasan Internal memiliki nilai rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata tertinggi 4,50.

Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.3 Pengawasan Internal**

Berdasarkan gambar diagram diatas, persentase jawaban responden untuk variabel Pengawasan Internal tinggi yaitu sebesar 52 %, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat melakukan Pengawasan Internal sangat penting bagi suatu Organisasi Perangkat Daerah

#### **4.1.4 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)**

##### **4.1.4.1. Validitas Konvergen**

Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternative dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loading*nya. Jika nilai *outer*

*loading* lebih besar dari (0,4) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.9**  
**Validitas Konvergen**

	<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>	<b>X2. Pengawasan Internal</b>	<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>
<b>X1.1</b>	<b>0.888</b>		
<b>X1.2</b>	<b>0.871</b>		
<b>X1.3</b>	<b>0.827</b>		
<b>X1.4</b>	<b>0.900</b>		
<b>X1.5</b>	<b>0.823</b>		
<b>X1.6</b>	<b>0.882</b>		
<b>X2.1</b>		<b>0.766</b>	
<b>X2.2</b>		<b>0.911</b>	
<b>X2.3</b>		<b>0.799</b>	
<b>X2.4</b>		<b>0.893</b>	
<b>X2.5</b>		<b>0.837</b>	
<b>X2.6</b>		<b>0.717</b>	
<b>Y1</b>			<b>0.910</b>
<b>Y2</b>			<b>0.937</b>
<b>Y3</b>			<b>0.915</b>
<b>Y4</b>			<b>0.764</b>
<b>Y5</b>			<b>0.841</b>
<b>Y6</b>			<b>0.805</b>

Sumber : SEM PLS (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa

4. Nilai *outer loading* untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dinyatakan valid.
5. Nilai *outer loading* untuk variabel Pengawasan Internal lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Pengawasan Internal dinyatakan valid.

6. Nilai *outer loading* untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan valid.

#### 4.1.4.2. Analisis Konsistensi Internal

Analisis konsistensi internal adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas komposit  $> 0,600$  (Hair Jr et al., 2017)

**Tabel 4.10**  
**Analisis Konsistensi Internal**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>	<b>0.933</b>	<b>0.937</b>	<b>0.947</b>	<b>0.749</b>
<b>X2. Pengawasan Internal</b>	<b>0.903</b>	<b>0.913</b>	<b>0.926</b>	<b>0.678</b>
<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>0.931</b>	<b>0.938</b>	<b>0.946</b>	<b>0.747</b>

Sumber : SEM PLS (2023)

Berdasarkan data analisis konsistensi internal pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel

4. Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar  $0,947 > 0,600$  maka variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik adalah reliabel
5. Pengawasan Internal memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar  $0,926 > 0,600$  maka variabel Pengawasan Internal adalah reliabel
6. Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar  $0,946 > 0,600$  maka variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah reliabel

#### 4.1.4.3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT)  $< 0,90$ , maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.11**  
**Validitas Diskriminan**

	<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>	<b>X2. Pengawasan Internal</b>	<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>
<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>			
<b>X2. Pengawasan Internal</b>	<b>0.837</b>		
<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>0.834</b>	<b>0.815</b>	

Sumber : SEM PLS (2023)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) maka

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dengan Pengawasan Internal sebesar  $0,837 < 0,900$ , korelasi variabel *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT). Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dengan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar  $0,834 < 0,900$  korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) dinyatakan valid.
2. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Pengawasan Internal dengan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar  $0,815 < 0,900$ , nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) dinyatakan valid.



#### 4.1.4.4. Kolinearitas (*Colinierity /Variance Inflation Factor/VIF*)

Pengujian kolinearitas adalah untuk membuktikan korelasi antar variabel laten/konstruktif apakah kuat atau tidak. Jika terdapat korelasi yang kuat berarti model mengandung masalah jika dipandang dari sudut metodologis, karena memiliki dampak pada estimasi signifikansistatistiknya. Masalah ini disebut dengan kolinearitas (*colinearity*). Nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* (Hair Jr et al., 2017).

Jika nilai VIF lebih besar dari 5,00 maka berarti terjadi masalah kolinearitas, dan sebaliknya tidak terjadi masalah kolinearitas jika nilai  $VIF < 5,00$  (Hair Jr et al., 2017).

**Tabel 4.12 Kolinieritas**

	<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>	<b>X2. Pengawasan Internal</b>	<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>
<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>			<b>2.535</b>
<b>X2. Pengawasan Internal</b>			<b>2.535</b>
<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>			

Sumber : SEM PLS (2023)

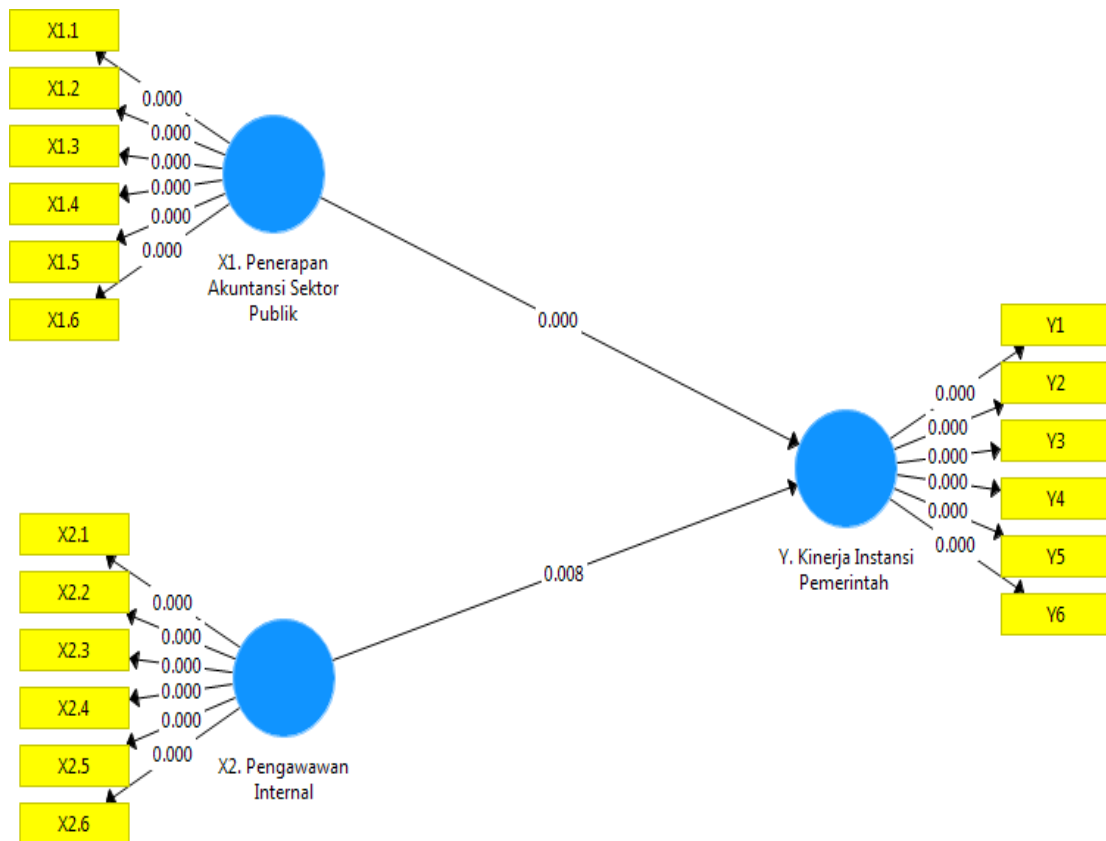
Dari data di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. VIF untuk korelasi Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dengan Kinerja Instansi Pemerintah adalah  $2,535 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinearitas)
2. VIF untuk korelasi Pengawasan Internal dengan Kinerja Instansi Pemerintah adalah  $2,535 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinearitas)

Dengan demikian, dari data-data di atas, model struktural dalam kasus ini tidak semua korelasi yang terbebas dari masalah kolinearitas.

#### 4.1.5. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam pengujian ini terdapat dua tahapan, yakni pengujian hipotesis pengaruh langsung dan pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung. Adapun koefisien-koefisien jalur pengujian hipotesis terdapat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 4.4**

#### **Pengujian Hipotesis**

##### 4.1.5.1. Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara) yakni :

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.

2. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya. (Hair Jr et al., 2017)

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) < Alpha (0,05) maka Ho ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).
2. Jika nilai probabilitas (P-Value) > Alpha (0,05) maka Ho diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)

**Tabel 4.13**  
**Hipotesis Pengaruh Langsung**

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik -&gt; Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>	0.512	0.505	0.118	4.340	<b>0.000</b>
<b>X2. Pengawasan Internal -&gt; Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>	0.353	0.358	0.134	2.643	<b>0.008</b>

Sumber : SEM PLS (2023)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh

1. Pengaruh langsung Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar 0.512 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
2. Pengaruh langsung Pengawasan Internal terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar 0,353 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,008 maka  $0,008 < 0,05$ , sehingga dapat

dinyatakan bahwa Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah .

#### 4.1.6. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. (Hair Jr et al., 2017)

1. Nilai R Square sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat
2. R Square sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang.
3. Nilai R Square sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali & Latan, 2015).

**Tabel 4.14**  
**R Square**

	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>	0.668	0.653

Sumber : SEM PLS (2023)

Pada tabel di atas diperoleh hasil pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,668 artinya besaran pengaruh 66,8%, hal ini berarti menunjukkan PLS yang kuat .

#### 4.1.7. F Square

Pengukuran F-Square atau  $F^2$  effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran  $F^2$  (f-square) disebut juga efek perubahan  $R^2$ . Artinya, perubahan nilai  $R^2$  saat variabel eksogen tertentu

dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Ghozali & Latan, 2015).

Kriteria F-Square menurut (Ghozali & Latan, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $F^2 = 0.02$  → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen;
2. Jika nilai  $F^2 = 0.15$  → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan
3. Jika nilai  $F^2 = 0.35$  → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

**Tabel 4.15**  
**F Square**

	<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>	<b>X2. Pengawasan Internal</b>	<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>
<b>X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik</b>			<b>0.311</b>
<b>X2. Pengawasan Internal</b>			0.148
<b>Y. Kinerja Instansi Pemerintah</b>			

Sumber : SEM PLS (2023)

Kesimpulan nilai F-Square dapat dilihat pada tabel 4.12 adalah sebagai berikut: Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai  $F^2 = 0,049$ , dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai  $F^2 = 0,148$  maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah .**

Hasil penelitian ini mempunyai koefisien jalur sebesar 0.512 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Nilai outer loading yang paling tinggi pada Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik adalah 0,900 pada X1.4 yakni Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan -catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur -unsur laporan keuangan. Dan nilai outer loading yang paling rendah adalah 0,823 pada X1.5 yakni Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Penyusunan anggaran merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan. Penyusunan anggaran publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Manik et al., 2022)

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto et al., 2013).

Akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini sedang berjalan. Kaitannya dengan reformasi sektor publik, otonomi daerah menjadi salah satu bagian dari reformasi sektor publik itu sendiri. (Sari, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Peilouw et al., 2023), (Septiani et al., 2022), (Gea, 2021), (Rahmawati, 2022), (Tadjudinsyah & Fitria, 2023) dan (Purba & Amrul, 2018) menunjukkan bahwa penerapan standart akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.2.2. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini mempunyai koefisien jalur sebesar 0,353 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,008 maka  $0,008 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Nilai *outer loading* yang paling tinggi pada Pengawasan Internal adalah 0,911 pada X2.2 yakni Suatu kegiatan atau transaksi sebaiknya dilakukan pemisahan wewenang secara tepat. Dan nilai *outer loading* yang paling rendah adalah 0,717 pada X2.6 yakni Sebaiknya terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi computer.

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Sanjaya et al., 2021)

Kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan seseorang. Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Alpi, 2019)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok et al., 2021), (Jatmiko, 2020), (Tadjudinsyah & Fitria, 2023) dan



(Rahayu & Yudi, 2021), menyebutkan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan arah positif, hal ini menunjukkan jika Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik memadai maka Kinerja Instansi Pemerintah juga akan meningkat.
2. Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan arah positif, hal ini menunjukkan jika Pengawasan Internal memadai maka Kinerja Instansi Pemerintah juga akan meningkat.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih memberikan pengawasan yang ketat atas pengendalian internal yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih ditingkatkan sehingga pelayanan ke masyarakat lebih cepat

3. Peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitriady, S. D., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 212–221.
- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Amran, A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–19.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Salemba Empat.
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(17), 19–35.
- Gea, I. R. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 1(1), 84–93.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP UNDIP.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen* (Edisi 2). BPF.
- Haryanto, H., Sahmuddin, S., & Arifuddin, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Heluka, R., Pattiasina, V., Sutisman, E., Bonsapia, M., & Patiran, A. (2022). Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Business Application*, 1(1), 39–52.
- Irawati, A., & Agesta, C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 56–70.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cet-2 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Lubis, G. J. S., Mardiani, D., Lubis, K., & Sari, E. N. (2023). Fraud Prevention in Local Government Accounting Information Systems: Literature Review. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 1, 1253–1266.
- Manik, L. F., & Sari, E. N. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada SMA Swasta Bagian Medan Utara. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 19–29.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Mubarok, R. Z., Rahmawati, T., Wulandari, H. K., & Riono, S. B. (2021). Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 3(2), 45–55.
- Mulyadi, M. (2011). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023).

- Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilimiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1), 111–122.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(2), 126–135.
- Rahmawati, W. R. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 51–58.
- Sabeni, A., & Ghozali, I. (2014). *Pokok Pokok Akuntansi Pemerintahan*. BPFY Yogyakarta.
- Sanjaya, S., Ammy, B., & Sipahutar, R. P. (2021). Determinant Model Of Corporate Disclosure Social Responsibility. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(2), 159–170.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–34.
- Septiani, S., Defitri, S. Y., & Sukraini, J. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 83–102.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pranada Media Group.

Swastha, B., & Handoko, T. H. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Liberty.

Tadjudinsyah, M. A., & Fitria, A. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(2), 1–19.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.

**KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN**  
**PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (STUDI PADA OPD DI PROVINSI SUMATERA UTARA)**

---

**Kepada Yth. Bapak / Ibu**

**Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi Sumatera Utara**  
**Di Tempat**

**Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Tedjo (1905170098) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Tedjo



## A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- a. SM : Sangat Memadai : dengan Skor 5
- b. M : Memadai : dengan Skor 4
- c. KM : Kurang Memadai : dengan Skor 3
- d. TM : Tidak Memadai : dengan Skor 2
- e. STM : Sangat Tidak Memadai : dengan Skor 1

## B. Identitas Responden

No. Responden : .....

Umur..... (Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SMK  D3  S1  S2  S3

Lama Belanja : <10 Tahun  10-20 tahun  > 20 Tahun

## 1. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SM	M	KM	TM	STM
<b>Ekonomi</b>						
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.					
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.					
<b>Efisiensi</b>						
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.					
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan					
<b>Efektivitas</b>						
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					
6	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					

## 2. PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (X1)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SM	M	KM	TM	STM
<b>Perencanaan Publik</b>						
1	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu					

<b>Penganggaran Publik</b>						
2	Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas.					
<b>Realisasi Anggaran Publik</b>						
3	Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan					
<b>Pengadaan Barang dan Jasa Publik</b>						
4	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan - catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur -unsur laporan keuangan.					
<b>Pelaporan Keuangan Sektor Publik</b>						
5	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan					
<b>Audit Sektor PublikPertanggung jawaban Publik</b>						
6	Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik					

### 3. PENGAWASAN INTERNAL (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SM	M	KM	TM	STM
Pengawasan preventif						
1	Standard operating procedure (SOP) sebaiknya dibuatkan untuk penyelenggaraan kegiatan pengelola anggaran					
2	Suatu kegiatan atau transaksi sebaiknya dilakukan pemisahan wewenang secara tepat					
3	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti transaksi yang valid dan sah					
Pengawasan korektif						
4	Sebaiknya terdapat tindakan disiplin yang tepat apabila terjadi penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku					
5	Sebaiknya terdapat pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses					
6	Sebaiknya terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi computer					

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### JAWABAN RESPONDEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL
A01	5	5	5	4	5	5	29
A02	5	5	5	5	5	3	28
A03	5	4	5	3	4	3	24
A04	3	3	4	4	3	3	20
A05	5	5	5	5	5	5	30
A06	4	4	3	3	4	4	22
A07	4	4	4	3	4	4	23
A08	5	5	5	5	5	5	30
A09	5	5	3	3	5	5	26
A10	2	2	2	3	2	2	13
A11	3	3	3	4	4	3	20
A12	4	3	4	3	3	4	21
A13	4	4	4	4	4	2	22
A14	3	3	3	3	3	2	17
A15	1	1	1	1	1	1	6
A16	3	2	3	3	4	5	20
A17	4	4	4	5	5	5	27
A18	5	5	5	3	3	5	26
A19	3	3	3	3	4	3	19
A20	5	5	5	3	3	3	24
A21	1	1	1	1	1	1	6
A22	4	4	4	3	4	4	23
A23	4	4	4	5	5	5	27
A24	5	5	4	5	3	4	26
A25	5	5	5	5	5	5	30
A26	4	4	4	4	5	3	24
A27	4	4	4	2	2	4	20
A28	4	4	4	2	4	4	22
A29	5	5	5	2	5	4	26
A30	3	3	3	3	3	3	18
A31	4	4	4	4	5	4	25
A32	5	5	5	5	5	5	30
A33	5	5	5	5	4	4	28
A34	3	3	3	4	2	4	19
A35	5	5	5	3	5	5	28
A36	1	1	1	1	1	1	6

A37	4	4	4	4	4	3	23
A38	3	3	3	3	3	3	18
A39	5	5	5	5	4	5	29
A40	2	3	5	5	3	5	23
A41	5	5	5	5	5	5	30
A42	5	4	4	4	5	4	26
A43	5	4	4	4	4	4	25
A44	5	5	5	5	4	5	29
A45	5	5	4	4	4	4	26
A46	5	4	3	3	3	3	21
A47	5	4	5	5	5	2	26
A48	5	4	4	4	4	5	26
A49	5	5	5	5	4	5	29

### JAWABAN RESPONDEN

### PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	5	5	4	4	4	4	26
A03	3	4	4	4	5	5	25
A04	3	3	3	3	2	4	18
A05	5	2	5	5	5	5	27
A06	4	5	5	5	4	5	28
A07	5	5	2	4	4	5	25
A08	5	5	5	4	5	5	29
A09	5	5	5	5	5	4	29
A10	2	2	2	2	2	2	12
A11	4	3	4	4	5	4	24
A12	4	4	4	1	4	4	21
A13	5	4	3	4	4	5	25
A14	4	4	4	5	4	4	25
A15	1	1	1	1	1	1	6
A16	3	2	2	2	5	4	18
A17	4	4	5	5	4	4	26
A18	5	4	4	4	1	5	23
A19	4	4	3	4	4	1	20
A20	5	5	5	5	5	5	30
A21	1	1	1	1	1	1	6
A22	5	4	4	4	5	5	27

A23	5	5	3	4	5	5	27
A24	4	5	5	5	5	5	29
A25	5	5	5	5	5	5	30
A26	5	4	4	4	5	5	27
A27	3	4	2	4	5	5	23
A28	5	4	4	5	5	5	28
A29	5	5	5	5	5	5	30
A30	4	4	4	4	4	4	24
A31	4	5	3	4	5	4	25
A32	4	4	4	4	2	4	22
A33	4	4	5	4	5	5	27
A34	5	5	5	5	5	5	30
A35	4	4	5	5	4	4	26
A36	1	1	1	1	1	1	6
A37	3	5	4	4	5	5	26
A38	3	3	3	3	3	3	18
A39	5	5	3	5	5	5	28
A40	5	4	4	4	5	5	27
A41	5	5	2	4	5	5	26
A42	5	5	3	2	2	2	19
A43	5	5	4	5	5	5	29
A44	5	5	5	5	5	5	30
A45	4	4	4	4	5	5	26
A46	3	3	2	3	3	3	17
A47	2	2	2	2	2	2	12
A48	4	5	5	5	5	5	29
A49	5	5	5	5	5	5	30

### JAWABAN RESPONDEN PENGAWASAN INTERNAL

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	4	4	4	5	5	5	27
A03	5	5	5	4	2	5	26
A04	4	4	3	4	4	5	24
A05	5	5	5	5	5	5	30
A06	3	5	4	4	3	3	22
A07	4	5	5	4	5	2	25
A08	5	5	5	5	5	5	30
A09	5	4	5	5	5	2	26

A10	2	2	2	2	2	2	12
A11	4	4	4	5	5	4	26
A12	4	4	5	4	4	4	25
A13	4	5	5	5	5	5	29
A14	4	5	5	5	5	4	28
A15	1	1	1	1	1	1	6
A16	4	4	5	4	5	5	27
A17	1	5	5	5	5	2	23
A18	4	3	3	3	3	5	21
A19	4	5	4	4	5	5	27
A20	1	5	5	5	5	3	24
A21	1	1	1	1	1	1	6
A22	4	4	1	4	4	4	21
A23	1	4	5	1	5	4	20
A24	4	4	4	4	1	4	21
A25	5	5	1	5	5	1	22
A26	4	4	4	4	4	5	25
A27	4	4	4	4	4	4	24
A28	3	3	3	3	3	4	19
A29	4	5	5	5	5	4	28
A30	4	4	4	4	4	3	23
A31	4	5	5	5	5	4	28
A32	5	5	5	5	5	4	29
A33	4	5	5	5	5	3	27
A34	4	5	2	5	5	5	26
A35	4	5	5	5	5	5	29
A36	1	1	1	1	1	1	6
A37	3	3	3	3	3	3	18
A38	3	3	3	3	3	3	18
A39	5	5	5	5	5	5	30
A40	4	5	5	3	5	5	27
A41	4	4	5	5	5	5	28
A42	4	4	5	5	5	5	28
A43	4	5	5	5	3	4	26
A44	4	5	5	5	5	5	29
A45	4	4	5	5	5	3	26
A46	4	5	3	3	3	4	22
A47	2	2	2	2	2	2	12
A48	4	5	4	4	5	4	26
A49	4	5	5	5	5	5	29





**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /IDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/01/2023

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 17/01/2023

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : tedjo  
NPM : 1905170098  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara secara umum mengalami peningkatan dari 2019-2021. Namun, beberapa komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja menurun cukup tinggi. 2. Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah melakukan reviu, terhadap program, kegiatan dan anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran, namun hasil dari reviu tersebut beberapa program dan kegiatan masih belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya. 3. Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara harus meningkatkan penyajian Penerapan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan yang terbuka untuk publik dikarenakan adanya penurunan evaluasi kinerja yang akan berdampak menurunnya kepercayaan publik.

Rencana Judul : 1.  Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal terhadap kinerja instansi pemerintah  
2.  Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah  
3.  Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Objek/Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL PEMPROV SUMUT

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

*Capitulum*

(tedjo)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/01/2023  
: tedjo

: 1905170098

: Akuntansi

: Akuntansi Sektor Publik

: 17/01/2023

: Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA (30 Januari 2023)

Nama Mahasiswa

NPM

Program Studi

Konsentrasi

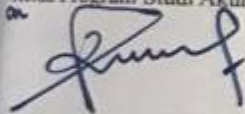
Tanggal Pengajuan Judul

Nama Dosen pembimbing<sup>\*)</sup>

Judul Disetujui<sup>\*)</sup>

Pengaruh penetapan Akuntansi sektor publik  
dan pengawasan Internal terhadap kinerja  
Instansi Pemerintah (Studi pada OPD di  
Provinsi Sumatera Utara).

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi



(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Februari 2023

Dosen Pembimbing



(.....)

Keterangan:  
\*) Ditanda-tangani Pimpinan Program Studi  
\*\*) Ditanda-tangani Dosen Pembimbing  
\*) Harus disertai oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengajuan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

SU

Yth.

Dekan

Ekonomi

UIN Sunan Gunung Djati Sumatera Utara



Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Identifikasi

: T E D J O

: 1 9 0 5 1 7 0 0 9 8

Tgl Lahir

: M E D A N . 0 5 J U N I 2 0 0 1

bidang Studi

: Akuntansi

Alamat Mahasiswa

: J L . M A N G A A N I L N G K I V  
M A B A R H I L I R R P H N O 7 8

Instansi Penelitian:

: O P D P E M P R O V S U M U T

Alamat Penelitian

: J L . D A N G E R A N D I P O N E G O R O  
N O . 3 0 M A D R A S H U L U

Sehubungan dengan permohonan ini kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :

Ketua jurusan / Sekretaris

RIVA UBAR HARAHAP, SE, AK, Msi, CA, CPA

Wassalam

Pemohon

TEDJO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8506/KBAN-PT/Akred/PEMB/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1265/IL3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 03 Dzulqaidah 1444 H  
23 Mei 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**OPD PEMPROV SUMUT**  
Jln. Pangeran Diponegoro No.30 Madras Hulu Kec. Medan Polonia  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Tedjo  
Npm : 1905170098  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal



**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





MAJELIS PEMBIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAK-PT/Akred/PT/2020  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622490 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631803  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1267/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dan Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 04 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Tedjo  
 N P M : 1905170098  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., AK., CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **23 Mei 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 03 Dzulqaidah 1444 H  
 23 Mei 2023 M

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
 1. Peringgal





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154  
Telepon (061) 4150461- 4524309, Faksimile (061) 4150194  
Pos-el [inspektorat@sumutprov.go.id](mailto:inspektorat@sumutprov.go.id), Laman [inspektorat.sumutprov.go.id/](http://inspektorat.sumutprov.go.id/)

Nomor : 000/1938/INSPE/VI/2023  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 09 Juni 2023

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1265/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

Nama : Tedjo

NPM : 1905170098

Program Studi : Akuntansi

Semester : VIII (delapan)

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Sehubungan dengan angka 1, dengan ini menyetujui Izin Riset Pendahuluan di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

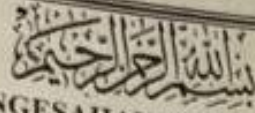
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



LASRO MARBUN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641201198701 1 002

**PENGESAHAN PROPOSAL**

berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 19 Juni 2023* menerangkan bahwa:

nama  
NPM  
tempat / Tgl.Lahir  
alamat Rumah  
Judul Proposal

: Tedjo  
: 1905170098  
: Medan, 05 Juni 2001  
: Jln. Mangan I LK IV Mabar Hilir No.78  
: Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD PEMPROV SUMUT)

proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA*

Medan, 19 Juni 2023

**TIM SEMINAR**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zuhra Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si  
NIDN : 0105087601





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Muehtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

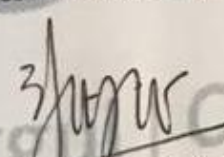
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa  
 N P M  
 Dosen Pembimbing  
 Program Studi  
 Konsentrasi  
 Judul Penelitian

: TEDJO  
 1905170098  
 : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Msi, AK, CA  
 : AKUNTANSI  
 : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN  
 PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH

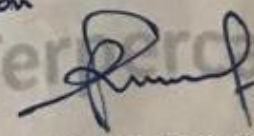
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	masih ada typo yg nrlais e. o.		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Daftar Pustaka	—		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	acc proposal lengkap ke seminar hari	30/23 5	3/

Dosen Pembimbing

  
 (Dr. Eka Nurmala Sari, SE,  
 Msi, AK, CA)

Medan, 2023  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

on

  
 (Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum.,SE.,M.Si)

Unggul Cerdas | Terpadu



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa  
 N P M  
 Dosen Pembimbing  
 Program Studi  
 Konsentrasi  
 Judul Penelitian

: TEDJO  
 1905170098  
 : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Msi, AK, CA  
 : AKUNTANSI  
 : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN  
 PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Penner masalah pibuteh lagi, dan kmasn masalah haus dan data pendelay.	29/5 23	2/
Bab 2	Teori u Indelitor. nuncel 3 referensi.	29/5 23	2/
Bab 3	ganh sem pls	29/5 23	2/
Daftar Pustaka	mendeley	29/5 23	2/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Wawancara / Angket kecam	29/5 23	2/
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, 2023  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

*[Signature]*

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE,  
 Msi, AK, CA)

*[Signature]*

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)

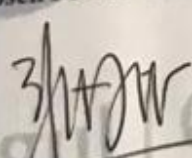
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa  
 N P M  
 Dosen Pembimbing  
 Program Studi  
 Konsentrasi  
 Judul Penelitian


: TEDJO  
 1905170098  
 : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Msi, AK, CA  
 : AKUNTANSI  
 : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN  
 PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Penomoran masih lebih kecil, gap review belum ada. banyak salah satu rumus	11/4 23	2/
Bab 2	- Urutan dan urutan picture. banyak gambar	11/4 23	2/
Bab 3	Shala picture	11/4 23	2/
Daftar Pustaka	Sitasi dosen min 5	11/4 23	2/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Instrumen penelitian lengkap	11/4 23	2/
Persetujuan Seminar Proposal			

Dosen Pembimbing

  
 (Dr. Eka Nurmala Sari, SE,  
 Msi, AK, CA)

Medan, 2023  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

an   
 (Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



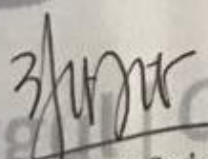
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa  
 N P M  
 Dosen Pembimbing  
 Program Studi  
 Konsentrasi  
 Judul Penelitian


: TEDJO  
 1905170098  
 : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Msi, AK, CA  
 : AKUNTANSI  
 : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN  
 PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAHAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	LSM masih belum ada penomoran dan deskripsi data. perbaikan yg diminta.	1/4 23	3/
Bab 2	- perbaikan teori masalah Advokasi Undang-Undang - revisi konsep tabel teori.	1/4 23	3/
Bab 3	perbaikan sesuai arahan.	1/4 23	3/
Daftar Pustaka	Referensi pendukung. sesuai dosen.	1/4 23	3/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Dosen Pembimbing

  
 (Dr. Eka Nurmala Sari, SE,  
 Msi, AK, CA)

Medan, 2023  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

an  
  
 (Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Senin, 19 Juni 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi  
 yang berisikan bahwa :

Nama : *Tedjo*  
 NPM : *1905170098*  
 Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 05 Juni 2001*  
 Alamat Rumah : *Jln. Mangan I LK IV Mabar Hilir No.78*  
 Judul Proposal : *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD PEMPROV SUMUT)*  
 Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Abstrak	<i>ini penelitian lebih fokus</i>
Bab I	<i>Perbaiki fenomena masalah</i>
Bab II	
Bab III	
Simpulan	<i>Perbaiki kutipan penelitian</i>
Disetujui	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Sukma Desmana, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/SK/BAAN-PT/Akred/PT/20218  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id #umsuamedan @umsuamedan

Nomor : 2096/IL3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 23 Muharam 1445 H  
10 Agustus 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**  
Jln. K.H Wahid Hasyim No. 8 Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Tedjo  
N P M : 1905170098  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD Provinsi Sumatera Utara)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Il. Januri, SE., MM., M.Si  
NIDN : 0109086502



Tembusan :  
1. Pertinggal





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154  
Telepon (061) 4150461-- 4524309, Faksimile (061) 4150194  
Pos-el [inspektorat@sumutprov.go.id](mailto:inspektorat@sumutprov.go.id), Laman [inspektorat.sumutprov.go.id/](http://inspektorat.sumutprov.go.id/)

Nomor : 000.9.6.3 / 2329 / ITPROVSU  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Menyelesaikan Riset

Medan, 16 Agustus 2023

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 2096/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, yaitu :  
Nama : Tedjo  
NPM : 1905170098  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan riset/penelitian di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





# TEDJO

## Tentang Saya

Saya seorang pekerja keras, tekun, mudah berpendapat, kritis, komunikatif, mampu bekerja dalam tim, menyukai hal baru dan akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan saya

## Kontak

0815 6480 1280

tedjo9107@gmail.com

Jl. Mangan 1 Lk. IV Mabar  
Hilir No 78

## Kemampuan

Keterampilan komunikasi interpersonal, berpikir kritis, dan melakukan analisis Bekerja Secara Tim

## PROFILE

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 05 Juni 2001  
Alamat : Jl. Mangan 1 Lk. IV Mabar  
Hilir No. 78  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam

## Pendidikan

SD SWSTA AL-IKHWAN

SMP NEGERI 25 MEDAN

SMA NEGERI 3 MEDAN

## Pengalaman Magang

2022  
PT. PELINDO TERMINAL PETI KEMAS  
Administrasi & Keuangan  
Melakukan Administrasi Berkas dan Laporan Keuangan

## Skill

MS OFFICE

BAHASA INGGRIS







### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Tedjo  
Npm : 1905170098  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi OPD Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data – data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Tedjo